

Cegah Kebocoran

Pemkot Uji Coba PHR "Online"

Denpasar (Bali Post) -

Kasus ngemplang pajak yang pernah menghebohkan negeri ini, menjadi inspirasi penerapan pajak berbasis teknologi informasi. Salah satunya yakni dengan melakukan pemungutan pajak secara *online*, khususnya untuk pajak hotel dan restoran (PHR). Hal ini pula yang sekarang dilirik Pemkot Denpasar. Karena itu, untuk tahap awal ini baru dilakukan pada beberapa wajib pajak saja.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar Dewa Nyoman Sumadi saat ditemui, Selasa (15/9) kemarin, pemberlakuan sistem jaringan *online* ini telah dimulai sejak empat bulan lalu. Sampai saat ini, penerapan sistem *online* ini masih dalam tahap uji coba bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali. Pemkot Denpasar telah menyiapkan sistem pajak berjaringan internet (*online*) bagi wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Bahkan, sistem ini sejatinya telah diujicobakan sejak empat bulan lalu. Hal ini dilakukan guna memudahkan dalam pengawasan dan meningkatkan pemasukan daerah khususnya dari PHR, di samping untuk mengurangi tingkat kebocoran (PHR). "Sistem ini masih dalam tahap uji coba dan penyempurnaan-

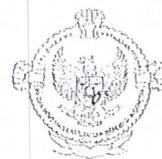
penyempurnaan lebih lanjut. Sistem ini dilakukan bekerja sama dengan pihak Bank BPD Bali," ujarnya.

Dikatakannya, dalam penerapannya, PHR *online* ini menggunakan perangkat yang akan disiapkan oleh pihak BPD Bali. Hingga saat ini, koordinasi dan komunikasi dengan Bank BPD Bali masih tetap dilakukan lewat uji coba dengan penerapan sistem yang lebih baik lagi. "Pemkot Denpasar terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak," ujarnya.

Dewa Semadi juga menjelaskan bahwa sistem ini mendapat respons positif para pengusaha, baik restoran dan hotel yang selalu disiplin dan taat dalam melaksanakan pembayaran pajak. Ia juga menyampaikan akan terus menyosialisasikan penerapan PHR *online* ini, sehingga dapat berjalan beriringan dengan program penyediaan mesin atau alat dari pihak Bank BPD Bali. "Meski baru dimulai pada empat bulan lalu, Pemkot Denpasar tetap berkomitmen dalam penerapan PHR *online* ini, yang nantinya bermuara pada kemudahan akses pengawasan serta untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan PHR," ujarnya. (kmb12)

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 2



Dewan Efektifkan Pembahasan RAPBD-P 2015

Gianyar (Bali Post) -

Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Togog berharap pembahasan RAPBD-P tahun 2015 dapat dilaksanakan tepat waktu. Pasalnya, hal ini sangat menentukan serapan APBD. Untuk itu, pihaknya mengaku akan berupaya mengefektifkan pembahasan RAPBD-P di dewan. "Saya sendiri optimis pembahasan bisa tepat waktu. Itu harus. Kita ingin serapan APBD di tahun 2015 ini bisa lebih tinggi agar pembangunan dan ekonomi masyarakat bisa bergulir," ujar Togog, Selasa (15/9) kemarin.

Salah satu poin penting yang akan menjadi perhatian pihaknya adalah pemanfaatan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) untuk kepentingan masyarakat dalam jangka pendek. Menurutnya, Silpa murni yang ada jumlahnya sekitar Rp 82 miliar. Silpa tersebut belum dirancang pemanfaatannya di RAPBD-P 2015. Silpa muncul akibat peningkatan PAD dan efisiensi program.

Dijelaskannya, silpa tersebut tersebar di beberapa SKPD. Diharapkan pemanfaatannya nanti bisa diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur termasuk bantuan kepada kelompok masyarakat. "Tentu yang banyak nanti kita harapkan untuk pertanian seperti lanjutan proyek saluran irigasi dan lainnya," katanya.

Pemerintah telah menyodorkan RAPBD-P tahun anggaran 2015 pada rapat paripurna DPRD Gianyar, Senin (14/9) lalu untuk mendapat pembahasan. Pada RAPBD-P 2015, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 1,66 triliun lebih. Rinciannya, Belanja Tidak Langsung dirancang sebesar Rp 1,105 triliun lebih atau 66,54 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp 555,757 miliar lebih atau 33,46 persen.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta tersebut, Wakil Bupati Made Mahayastra menjelaskan, dari pos Belanja Tidak Langsung, alokasi terbesar adalah untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 913,408 miliar lebih atau 82,66 persen. Belanja lainnya hanya sebesar Rp 191,644 miliar lebih (17,34 persen). Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 44,641 miliar lebih atau 8,03 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 292,381 miliar lebih (52,61 persen) dan Belanja Modal sebesar Rp 218,734 miliar lebih (39,36 persen).

Sementara dari sisi pendapatan, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,433 triliun lebih. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 408,876 miliar lebih atau 28,53 persen, Dana Perimbangan Rp 684,606 miliar lebih (47,76 persen) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 339,849 miliar lebih (23,71 persen). Khusus PAD, jika dibandingkan dengan yang dialokasikan di APBD induk, mengalami peningkatan sebesar Rp 38,196 miliar lebih atau 10,3 persen.

Mahayastra menjelaskan, perencanaan PAD dilakukan dengan pendekatan potensi riil dengan mempertimbangkan realisasi tahun berjalan, perkembangan jumlah objek, serta situasi ekonomi di masa yang akan datang. Struktur PAD sampai saat ini masih didominasi rencana penerimaan

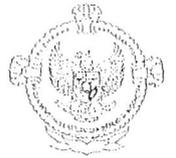
dari pajak daerah. Walaupun demikian, intensifikasi objek penerimaan di luar pajak daerah tetap menjadi perhatian seperti retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah.

Kemudian untuk Dana Perimbangan, dalam RAPBD-P 2015 dirancang meningkat sebesar Rp 17,961 miliar lebih atau 2,69 persen dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan yang sebesar Rp 666,644 miliar lebih. Peningkatan terjadi pada penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan DAK.

Lebih lanjut dikatakannya, perubahan APBD tahun 2015 diperlukan mengingat adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perkiraan meningkatnya pendapatan daerah. Selain itu, faktor lainnya berupa meningkatnya pengeluaran biaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang belum dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD tahun 2015. (kmb25)

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 9



DPRD Karangasem Terima Ranperda APBD-P 2015 Ranperda Tatib Dewan Disahkan

DPRD Karangasem dalam sidang paripurna, Selasa (15/9) kemarin, menerima Ranperda APBD Perubahan 2015. Ranperda itu diserahkan Penjabat Bupati Karangasem Drs. Ida Bagus Ngurah Arda dan diterima Ketua DPRD didampingi pimpinan dewan lainnya. Sementara itu, pada sidang itu juga, Dewan menetapkan Ranperda DPRD Karangasem tentang Tata Tertib Dewan menjadi Perda. Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi mengatakan, Dewan siap membahas Ranperda APBD-P 2015. Sidang DPRD Karangasem kemarin dihadiri cukup banyak

anggota DPRD.

Pj. Bupati Arda menyampaikan, kebijakan yang ditempuhnya dalam menyusun APBD-P itu berpegang pada prinsip anggaran yang telah ditetapkan selama ini, yakni ranperda disusun berdasarkan format anggaran defisit. Di mana terjadi selisih antara pendapatan dan belanja lebih besar, sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 126,9 miliar lebih. Defisit itu ditutupi dengan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya.

Pj. Bupati menambahkan, pendapatan daerah pada APBD

Induk 2015 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun. Dalam perubahan ini, direncanakan naik sebesar Rp 143 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 1,3 triliun lebih atau naik 11,73%.

Sementara PAD dalam anggaran induk 2015 sebesar Rp 205 miliar, naik sebesar Rp 26,8 miliar lebih (13,08%) sehingga target PAD setelah perubahan menjadi Rp 232 miliar lebih.

Rincian dari PAD itu, di antaranya pajak daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp 136,9 miliar lebih naik 8,83% Rp 11,108 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 125,8 miliar lebih. Retribusi daerah direncanakan berubah menjadi sebesar Rp 12,4 miliar lebih, mengalami kenaikan Rp 2,183 miliar lebih (21,33%) dari anggaran induk yang hanya Rp 10,236 miliar lebih.

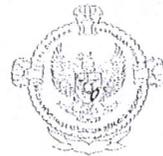
Dana perimbangan naik 0,18% atau Rp 1,3 miliar, dari semula diinduk Rp 726 miliar lebih menjadi Rp 727 miliar lebih. Di lain pihak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba usaha daerah dalam perubahan tahun ini direncanakan Rp 13,4 miliar lebih, turun 8,04% dari anggaran induk sebesar Rp 14,633 miliar lebih. "Lain-lain PAD yang sah dalam APBD tahun ini direncanakan Rp 69,309 miliar naik 27,02% atau Rp 14,7 miliar dari anggaran induk yang hanya Rp 54,565 miliar lebih. (ad906)



TERIMA RANPERDA - Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi didampingi tiga wakil ketua menerima Ranperda APBD-P 2015 dari Pj. Bupati.

Edisi : Revisi, 16 September 2015

Hal : 4



Kasus Dugaan Pemerasan CPNS Tabanan

Dipertanyakan, Bentuk Pemaksaan oleh Terdakwa

Denpasar (Bali Post) -

Perkara dugaan pemerasan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Tabanan dengan terdakwa mantan Kabid Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan I Gede Jagrem dan Kasubag Hukum dan SDM DKP Tabanan Nyoman Candra Dewi sudah dibacakan pekan lalu. Selasa (15/9) kemarin, majelis hakim pimpinan Putu Gede Haryadi memberikan pada kuasa hukum terdakwa menyampaikan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa Jagrem yakni Diah Sulistiawati, Candra Rahmayati dan Anna Endahwati menilai surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dakwaan jaksa harus diabaikan dan batal demi hukum. Tim kuasa hukum dalam sidang kemarin juga mengatakan bahwa dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap. "Seperti terkait pencantuman dan penguraian waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," beber tim kuasa hukum terdakwa Jagrem.

Dalam dakwaan disebutkan jika tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam rentang waktu dua tahun yaitu pada Desember 2012 hingga Desember 2014. Karenanya itu menimbulkan pertanyaan, kapan waktu yang sebenarnya terjadi dugaan tindak pidana

korupsi dalam perkara a quo itu. Sedangkan tim penasihat hukum Nyoman Candra Dewi tak kalah gesit dalam eksepsi yang disampaikan dalam persidangan. Dikatakannya, dalam dakwaan JPU, secara prinsip mendasarkan adanya tindakan dan upaya terdakwa melakukan pemaksaan terhadap para pegawai honorer DKP Tabanan yang sudah dinyatakan lolos sebagai CPNS. "Namun JPU tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah dilakukan secara lisan, tertulis atau fisik, psikis atau cara-cara dan bentuk yang secara riil dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemaksaan," kata tim kuasa hukumnya, H.M. Sukirman dkk.

Dikatakannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini. Berdasarkan ketentuan undang-undang maka jelaslah bahwa unsur penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepada terdakwa harus diajukan dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, surat dakwaan yang disusun JPU tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Dakwaan juga disebut mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara, serta terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak didampingi pengacara.

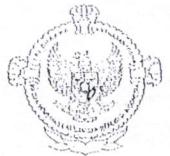
Sebelumnya, JPU Fatur Rohman dkk. mengatakan

bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara Desember 2012 sampai Desember 2014. Sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian, terdakwa dinilai telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. "Yakni, memaksa pegawai honorer DKP yang sudah dinyatakan jadi CPNS tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS tahun 2014 membayar uang sebesar Rp 5 juta sampai Rp 60 juta," terang jaksa dalam surat dakwaannya.

Pembayaran dimaksudkan agar calon PNS ini dapat diberikan SK CPNS dan PNS tahun 2014. Dalam uraian jaksa, ada 23 calon korban pemaksaan. Salah satunya yang disebut di persidangan adalah Ni Made Yudiani sebesar Rp 60 juta, saksi Made Subagia Rp 60 juta, Ni Gusti Ayu Sudiati Rp 40 juta, Ketut Sudiana Rp 40 juta, Ni Made Sujati Rp 5 juta, Ketut Muliadi Rp 60 juta, Suliantika Rp 60 juta, Sudiarta Rp 60 juta, dan sejumlah korban lainnya hingga 23 orang. (kmb37)

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 5



Kejaksaan Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

Negara (Bali Post) -

Kendati proses penyelidikan berjalan hampir beberapa tahun, kasus perjalanan dinas Kepala Daerah tahun 2000-2010 hingga kini masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara. Kejaksaan menetapkan satu tersangka, mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa. Selain Winasa, sejumlah saksi juga telah dilakukan pemeriksaan. Namun, Kejari sampai saat ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, Suhadi, dikonfirmasi Selasa (15/9) kemarin mengatakan kasus ini masih dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selain itu, saat ini belum ada tersangka baru selain I Gede Winasa. Sebelumnya, kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk terhadap Winasa sebagai tersangka.

Kejaksaan juga telah menelusuri bukti perjalanan dinas Bupati ke sejumlah tempat. Sebagian besar perjalanan dinas itu diketahui fiktif, namun ada juga yang memang benar dilakukan. Kasus SPPD Kepala Daerah tahun 2009-2010 ini awalnya menjadi temuan BPK RI. Selama penyelidikan, sejumlah saksi di antaranya mantan ajudan Bupati hingga Sekda juga telah diperiksa. Berikut bukti-bukti tiket perjalanan dan manifes dari maskapai yang digunakan. (kmb26)

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 12



Korupsi Bantuan Sapi

Ketua Kelompok Divonis Tiga Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Sidang kasus korupsi bantuan sapi pada Kelompok Pucang Sari, Rendang, Karangasem, memasuki putusan. Dari tiga terdakwa, hanya dua yang dibacakan vonisnya oleh hakim. Sebab, terdakwa yang perempuan sedang sakit, yakni setelah melahirkan dia mengalami kecelakaan.

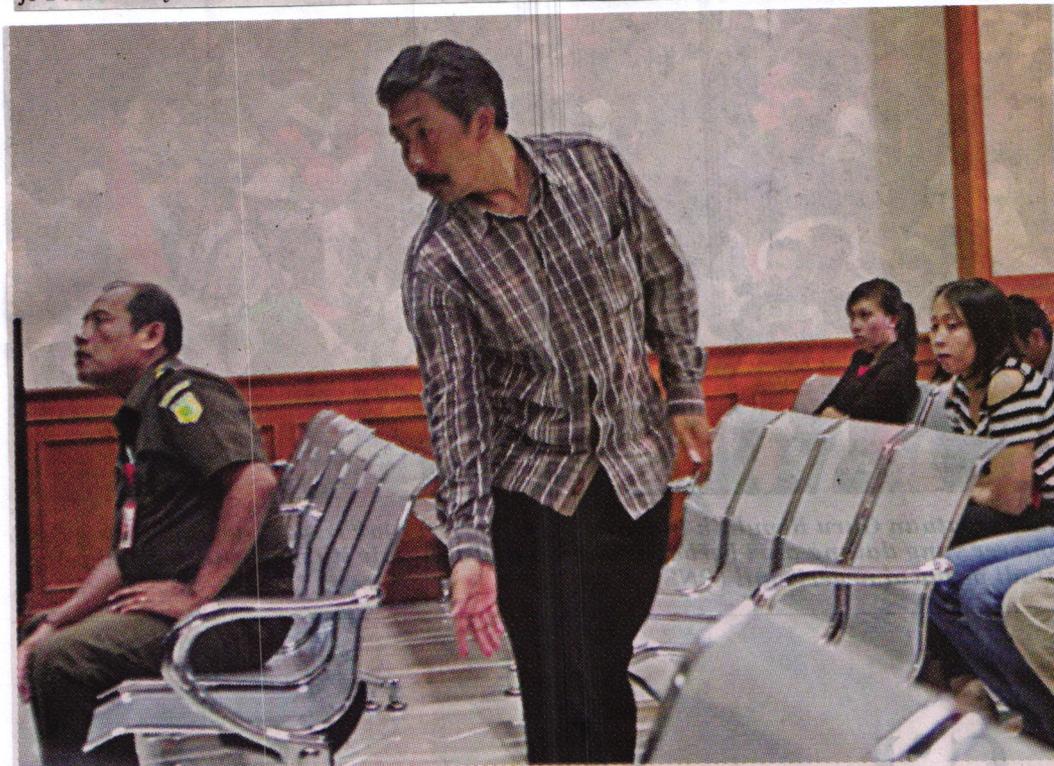
Dalam sidang kemarin, Ketua Kelompok Mangku Laba divonis paling tinggi yakni tiga tahun penjara. Dia masih mendapatkan potongan, karena sebelumnya jaksa menuntutnya 3,5 tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Dewa Suwardita, terdakwa yang didampingi pengacara Ketut Bakuh dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 1999

tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas pertimbangan itu, Mangku Laba dihukum selama tiga tahun penjara.

Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan. Tak hanya itu, beban uang pengganti bagi Mangku Laba juga cukup besar, lantaran dominan dalam kasus ini dia yang menikmati. Mangku Laba diwajibkan mengembalikan Rp 443 juta, jika tidak mampu harta bendanya yang akan disita. Dan jika tidak memiliki harta benda, hukumannya akan ditambah 1,5 tahun.

Sementara untuk terdakwa kedua, I Made Juliasa alias Kadek Juli, diganjar dengan pasal yang sama. Hakim menghukumnya 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 50 juta, subsider dua bulan. Terkait dengan kerugian negara yang dinikmati, sudah dikembalikan jauh lebih awal. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dua tahun penjara. Atas vonis ini, baik jaksa atupun pengacara menyatakan pikir-pikir. (kmb37)



Bali Post/wan

VONIS - Dua terdakwa kasus korupsi bansos sapi Kelompok Pucang Sari, Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, Mangku Laba dan I Made Juliana, bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Renon Selasa (15/9) kemarin.

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 2



Terancam Molor, Proyek Taman Koridor Lapangan Lumintang

Denpasar (Bali Post) –

Sejumlah proyek fisik yang ditangani sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Denpasar, kini sedang berlangsung. Sayangnya, realisasinya tidak semuanya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Bahkan, ada pekerjaan yang baru terealisasi 50 persen. Padahal, waktu penyerahannya sudah dekat. Seperti yang terjadi pada proyek taman koridor Lapangan Lumintang, Denpasar Utara. Dikhawatirkan, penyelesaian proyek tersebut molor dari rencana yang sudah ditetapkan.

Hal ini terungkap saat Penjabat (Pj.) Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya didampingi Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) I Made Kusuma Diputra mengunjungi sejumlah proyek, Selasa (15/9) kemarin. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Denpasar berjalan baik sesuai dengan rencana. Dalam kunjungan ke lapangan, pelaksanaan proyek sebagian besar telah berjalan dengan baik.

Ada satu proyek yang diberikan perhatian serius Pj. Wali Kota yakni penataan taman koridor di lapangan umum Lumintang. Dalam kontrak, proyek ini harus sudah diserahkan pada tanggal 4 Oktober mendatang. Namun saat ini, pengerjaannya baru 50 persen. "Untuk itu saya perintahkan agar menambah tenaga ker-

janya sehingga proyek ini tidak molor," perintah A.A. Geriya. Penambahan tenaga kerja ini, dimaksudkan agar proyek penataan taman ini bisa diserahkan tepat pada waktunya. Ia juga minta agar Kepala SKPD terkait tetap mengawasi pelaksanaan proyek penataan ini sehingga sesuai harapan.

Pelaksana lapangan penataan Taman Koridor Lumintang dari CV Nagata Karya Gusti Ketut Budiadnyana mengatakan, saat ini pelaksanaan proyek ini telah mencapai 50 persen. Meski demikian, ia yakin proyek ini akan bisa selesai tepat waktu. "Memang untuk penataan taman ini baru 50 persen. Namun untuk pembuatan patung dan mesin air mancur, telah dibuat di tempat lain sehingga tinggal memasang saja," ujarnya.

Batas waktu proyek penataan taman hanya 60 hari kelender yang mulai dikerjakan tanggal 6 Agustus lalu dengan nilai proyek Rp 900 juta lebih. Terkait adanya perintah untuk menambah tenaga kerja, pihaknya akan segera melaksanakan dan juga melaksanakan kerja secara lembur sehingga target pelaksanaan proyek dapat tercapai.

Sementara untuk pelaksanaan proyek lain seperti Pembangunan Sentral Parkir Lumintang, A.A. Gede Geriya mengatakan telah berjalan dengan baik. Demikian juga proyek revitalisasi Pasar Gunung Agung capaiannya

melebihi target dari 86,415 persen yang direncanakan dan realisasinya telah 88,215 persen. "Ini sangat bagus bagi pelaksana proyek lainnya untuk melaksanakan proyek tepat waktu," tegasnya.

Proyek Manajer PT Undagi Mandiri Gede Arthana Putra yang melaksanakan revitalisasi Pasar Gunung Agung mengatakan, untuk pelaksanaan revitalisasi pasar ini telah berjalan melebihi realisasi yang direncanakan. Menurut rencana, progres pembangunan rencananya saat ini 86,415 persen, namun realisasinya melebihi rencana yaitu 88,215 persen. Menurut Arthana Putra, proyek revitalisasi pasar ini seluas 1.152 m2 yang terdiri dari dua lantai. Pelaksanaan proyek ini dimulai sejak 7 Mei 2015 dan rencananya selesai 2 November 2015 dengan nilai proyek Rp 4.699.844.000. Setelah revitalisasi pasar tersebut, akan terdapat lapak kering sebanyak 66 lapak di lantai satu dan 50 lapak di lantai dua. Sedangkan untuk lapak basah, di lantai satu sebanyak 24 lapak dan lantai dua 16 lapak. (kmb12)

Edisi : Rabu, 16 Sept 2015

Hal : 2



WBD Jatiluwih Pemkab Rancang Tapal Batas Monumen Padi



Bali Post/dok

SAWAH - Panorama terasering sawah di WBD Jatiluwih.

Tabanan (Bali Post) -

Rencana Pemkab Tabanan merancang batas wilayah WBD Jatiluwih akhirnya terlaksana meski hanya di satu titik dari tiga pintu masuk. Dengan dana Rp 132 juta dari rancangan anggaran Rp 142 juta yang diajukan, WBD Jatiluwih tahun ini akan memiliki satu tapal batas yang berlokasi di Banjar Ngis Kelod, Jegu, Penebel (perbatasan Kecamatan Kerambitan-Penebel).

Dewan Tabanan asal Penebel I Wayan Tamba, saat dikonfirmasi terkait tapal batas tersebut, membenarkan di lokasi itu akan dibangun monumen padi sebagai ciri khas memasuki wilayah Jajar Kemiri, Batukaru, Penebel, yang

terkenal dengan objek wisata Jatiluwih. Anggarannya sudah disepakati dalam APBD perubahan 2015. Hanya, pihaknya tidak tahu besarnya dan apakah ini juga dikoreksi pada saat verifikasi di Pemprov Bali.

Menurutnya, tapal batas berbentuk monumen padi setidaknya membantu menjawab kebingungan para wisatawan yang datang dari arah Kerambitan. "Selama ini belum ada tanda nyata memasuki wilayah Kecamatan Penebel dari arah Meliling, Kerambitan, sehingga banyak wisatawan bingung," ujarnya belum lama ini.

Dikatakannya, Kecamatan

Penebel sebagai penghasil pertanian khususnya padi Bali layak dibuatkan simbol-simbol sesuai keyakinan masyarakat setempat. "Perlu ada media promosi dan maket-maket berupa monumen, tugu atau bangunan lain sebagai ciri khas," jelasnya. Monumen berbentuk padi rencananya dibangun di lahan kosong seluas 1,5 are dengan batas peminjaman 30 tahun. Untuk lebih mempercantik, monumen akan dihiasi dengan taman.

Camat Penebel Putu Agus Hendra Manik mengatakan hal yang sama. Meski Jatiluwih telah menyandang status Warisan Budaya Dunia (WBD), sampai sekarang kawasan yang terkenal dengan panorama terasering sawahnya yang indah ini, belum memiliki batas wilayah secara permanen.

Rencana pembuatan batas wilayah sebenarnya sudah lama disampaikan. Hanya, karena terbentur masalah dana, rencana tersebut lebih dimatangkan khususnya terkait bangunan seperti apa yang akan didirikan di tiga perbatasan pintu masuk ke kawasan WBD Jatiluwih. "Jika disetujui, kemungkinan dibangun Oktober mendatang," ungkap Hendra Manik. (kmb28)

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 14



Wisman Lewat Padangbai

Pemkab Tak Bisa

Tarik Retribusi

Amlapura (Bali Post) -

Ribuan wisatawan mancanegara (wisman) menyeberang dari Padangbai menuju ke gili-gili di Lombok. Sayangnya Pemkab Karangasem belum memiliki dasar hukum untuk memungut retribusi. Pemkab hanya bisa menonton ribuan wisman yang dibawa biro perjalanan wisata dari Denpasar menyeberang lewat pelabuhan rakyat di Padangbai.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Karangasem, Nengah Sumardi, Selasa (15/9) kemarin di Karangasem. "Kita di Pemkab Karangasem, belum bisa mendapatkan retribusi atau pajak dari banyaknya wisman yang menggunakan pelabuhan rakyat di Padangbai," katanya. Masalahnya, payung hukum berupa perda tak ada sehingga tak bisa memungut retribusinya.

Pengelola *boat* di Padangbai, Made Sukadana, mengatakan, sampai September ini, wisman maupun wisdom masih tinggi kunjungannya ke Gili seperti ke Gili Terawangan. Dulu, kunjungan ramai terjadi pada Juni sampai Agustus, tetapi tahun ini wisman membeludak September. Pada Sabtu dan Minggu, wisman atau wisdom menyeberang dari pelabuhan rakyat Padangbai ke Gili rata-rata 600 orang. Sementara di luar Sabtu dan Minggu 200 sam-

pai 300 orang. Karena wisatawan yang menyeberang membeludak, kapal *boat* yang melayani penyeberangan bisa mencapai belasan unit. Sementara tiket per orang tak tentu, tergantung dari tawar-menawar. Namun kisarannya ada Rp 300 ribu s.d. Rp 600 ribu per orang.

Sumardi mengakui Pemkab Karangasem tak bisa berbuat banyak. Sebenarnya, ada celah Pemkab Karangasem mendapatkan pemasukan dari pengelolaan pelabuhan, jika Perda PT Karangasem Sejahtera (KS) disetujui dan disahkan dewan. Namun pada sidang membahas Perda PT KS itu, sejumlah fraksi tak setuju, sehingga pembahasan atau penetapan Ranperda PT KS menjadi Perda ditunda. "Kami akan mengomunikasikan lagi agar Ranperda PT KS itu bisa dibuka kembali untuk dibahas dan ditetapkan," paparnya.

Edisi : Rabu, 16 Sept 2015

Hal : 15



Bali Post/gik

MENINGKAT - Arus penyeberangan wisatawan dari Pelabuhan Rakyat Padangbai, menuju objek wisata Gili Terawangan Lombok. Ratusan wisatawan tersebut menyeberang menggunakan speed boat.

Sebenarnya, PT KS bisa mengelola sembilan jenis, termasuk pengelolaan pelabuhan rakyat dan pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo. Soalnya, hanya PT KS yang diberikan kewenangan oleh Menhub untuk mengelola pelabuhan. Selama ini, pelabuhan hanya dikelola Pelindo. "Ada

suratnya Menhub memberikan kewenangan kepada PT KS untuk mengelola pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo. Tentunya, kalau sudah ada perda untuk PT KS. Dengan demikian dari sana Pemkab bisa mendapatkan retribusi dari pengguna pelabuhan atau dermaga rakyat di Padangbai,"

paparnya.

Berbeda dengan Pemkab yang hanya bengong menonton. Sementara pihak Desa Pakraman Padangbai mampu mendapatkan pemasukan Rp 1,3 miliar per tahun dari *punia* wisman atau pihak biro perjalanan wisata yang masuk ke desa itu. (013)

Edisi : Rabu, 16 Sept 2015

Hal : 15